



# **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segenap ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 sehingga dapat diselesaikan. Rencana Kerja 2019 ini adalah sebagai pondasi yang sangat fundamental dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Pemerintah secara umum menuntut peran serta seluruh bagian dalam penentuan sikap dan tujuan dalam lembaga, sehingga kata kunci dari tuntutan tersebut adalah "Partisipasi" yang dituangkan dalam bentuk rencana. Organisasi apapun itu namanya tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa diikuti oleh fungsi manajemen dan perencanaan.

Guna menyelaraskan semua kondisi tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam telah menuangkan seluruh program dan kegiatan dalam sebuah Rencana Kerja (RENJA) TA 2019. Belanja yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang menunjang dengan harapan pencapaian target pendapatan 2019 dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk.I

NIP 19701120 200003 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) .....	
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD .....	23
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Program.....	30
4.2. Kegiatan.....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan

11. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah;

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan Perencanaan, Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu (Tahun-2) 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) 2018, serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah sebagai Panduan untuk pelaksanaan dan penyusunan program/kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2019, meliputi :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **2. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### **3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
  - 3.2.1. Tujuan
  - 3.2.2. Sasaran

#### **4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Program dan Kegiatan
  - 4.1.1. Program
  - 4.1.2. Kegiatan

#### **5. BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPPRD Kota Batam tahun 2017 dan tahun berjalan 2018 serta perkiraan target anggaran tahun 2019.

Sejalan dengan berjalan waktu, pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah BPPRD Kota Batam telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2017 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ditemukan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan



Pada Perangkat Daerah BPPRD Kota Batam dalam Pelaksanaan Renja 2017 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain:

Tabel.1  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017

NO	PROGRA/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,150,000,880.00	1,902,387,316.00	88.48
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,853,415,510.00	1,542,450,556.00	83.22
<b>Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	3,047,067,000.00	2,988,528,550.00	98.08
4	Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	491,922,880.00	479,782,200.00	97.53
5	Pembinaan dan Penertiban Reklame	1,122,542,720.00	1,105,868,520.00	98.51
6	Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak	533,585,000.00	533,585,000.00	100.00
7	Sosialisasi Pajak Daerah	318,369,750.00	269,139,750.00	84.54
8	Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	630,915,000.00	630,015,000.00	99.86
9	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	731,306,720.00	623,174,520.00	85.21
10	Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	205,050,000.00	197,250,000.00	96.20

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ditemukan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan
  - a. Diberlakukannya Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Sehingga terdapat beberapa perbedaan dengan Perpres yang lama Nomor 54 Tahun 2010 terkait Pengadaan Barang/Jasa
  - b. Mulai dilaksanakannya penggunaan Aplikasi SIRUP dan SPSE yang merupakan hal baru bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengadaan
  - c. Keterbatasan Anggaran Kas Daerah setiap bulannya sehingga hanya dapat dilakukan pencairan terhadap beberapa pengadaan yang bersifat prioritas
  - d. Kenaikan indeks harga satuan barang dan faktor lainnya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu belum maksimalnya penyerapan terhadap realisasi anggaran yang sudah ditetapkan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
  - a. Perlunya dilakukan Bimtek/Sosialisasi secara berkala terkait Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, khususnya KPA dan PPTK yang melakukan proses pengadaan dan dibutuhkan waktu untuk penyesuaian penggunaan Aplikasi yang berkaitan dengan Pengadaan tersebut;
  - b. Agar Tim BPKAD melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Rencana Permintaan Pembayaran (RPP) yang diajukan OPD sehingga jadwal pencairan dapat terakomodir dan berjalan lancar sesuai dengan dana yang tersedia.

Tabel. T-C 29  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018**  
**Kota Batam**

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan:</b> Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah									
	<b>Bidang Urusan:</b> Pendapatan Asli Daerah									
	<b>Program:</b>									
	<b>1)Peningkatan Pelayanan Administrasi</b>									

			<b>Perkantoran</b>									
			Kegiatan: 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	100 %
			<b>Program</b> 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
			Kegiatan: 2)Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	100%
			<b>Program</b>									
			<b>3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>									
			Kegiatan: 3.1)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Dari Sektor PBB-P2	Tercapainya target penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2	235.622 WP, 13 Kali Bulan Panutan	Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat Kota Batam	300.000 WP, 1 Kali Bulan Panutan Tk. Kota Batam	98.08%	Tercapainya target penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2	250.000 WP, 1 Kali Bulan Panutan Tk. Kota Batam	100%



				Kegiatan: 3.5)Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	7400 Surat Tagihan	Terlaksananya penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan aktif	20.000 Surat Tagihan	85.21%	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	12.000 Surat Tagihan	100 %
				Kegiatan: 3.6)Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	-	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	96.20%	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100 %
				Kegiatan: 3.7)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2	-	-	-	-	Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2	Berkurangnya Piutang PBB-P2	100 %

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2017 adalah :

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah Realisasi sebesar Rp. 648,218,537,854,87,-
2. Jumlah pajak daerah sebanyak 9 pajak daerah.

Tabel T-C.30

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam

NO	Indikator Program	SP M/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perkantoran		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur serta Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	
3	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Dari Sektor PBB-P2		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	Terlaksananya jatuh tempo pemba	Tercapainya target penerimaan pajak	Tercapainya target penerimaan pajak	Tercapainya target penerimaan pajak	300.000 WP, 1 Kali Bulan Panutan Tk. Kota	250.000 WP, 1 Kali Bulan Panutan Tk.	210.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	210.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	

				yan, penya mpaian SPPT PBB P2, bulan panuta n PBB tingkat kota	daerah dari sektor PBB- P2	daerah dari sektor PBB- P2	daerah dari sektor PBB- P2	Batam	Kota Batam			
4	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Dari Sektor BPHTB			Terlak sanana ya himbau an dan monito ring peralih an WP BPHTB serta terlaks ananya a silatur ahmi dan apres asi terhad ap pelaku usaha	Tercap ainya target peneri maan pajak daerah dari sektor BPHTB	Tercap ainya target peneri maan pajak daerah dari sektor BPHTB	Tercap ainya target peneri maan pajak daerah dari sektor BPHTB	1 Kali Silatur ahmi dengan Pelaku Usaha	1 Kali Silatur ahmi denga n Pelaku Usaha	2 Kali Silatur ahmi denga n Pelaku Usaha	2 Kali Silatur ahmi denga n Pelaku Usaha	
5	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah			Terlak sanana ya sosiali sasi pajak pajak daerah terhad ap wajib pajak daerah	Terlak sanana ya sosiali sasi pajak pajak daerah terhad ap wajib pajak daerah	Terlak sanana ya sosiali sasi pajak pajak daerah terhad ap wajib pajak daerah	Terlak sanana ya sosiali sasi pajak pajak daerah terhad ap wajib pajak daerah	3 Sosialis asi/ 750 wajib pajak	1 Sosialis asi/2 00 wajib pajak	3 Kali Sosialis asi	3 Kali Sosialis asi	
6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaks ananya Infroma si Pelayan an Pajak Daerah melalui Media Propaga nda, Promosi	Terlaks ananya Infroma si Pelayan an Pajak Daerah melalui Media Propaga nda, Promosi	Terlaks ananya Infroma si Pelayan an Pajak Daerah melalui Media Propaga nda, Promosi	Terlaks ananya Infroma si Pelayan an Pajak Daerah melalui Media Propaga nda, Promosi	1 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, R adio dan Cetak Spandu k/Balih o	1 Paket Sistem Aplika si, Medi a Massa, Radio dan Cetak Spand uk/Bal	1 Paket Sistem Aplika si, Medi a Massa, Radio dan Cetak Spand uk/Bal	1 Paket Sistem Aplika si, Medi a Massa, Radio dan Cetak Spand uk/Bal	



				dan Iklan serta Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	dan Iklan serta Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	dan Iklan serta Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	dan Iklan serta Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi		iho	iho	iho	
7	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaksananya penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penanganan aktif	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penanganan aktif	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penanganan aktif	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penanganan aktif	20.000 Surat Tagihan	12.000 Surat Tagihan	9080 Surat Tagihan	9080 Surat Tagihan	
8	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaksananya pembiayaan dan pemeriksaan wajib pajak	Terlaksananya pembiayaan dan pemeriksaan wajib pajak	Terlaksananya pembiayaan dan pemeriksaan wajib pajak	Terlaksananya pembiayaan dan pemeriksaan wajib pajak	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
9	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			-	Terlaksananya Penyelaksanaan Piutang Wajib Pajak PBB-P2	Terlaksananya Penyelaksanaan Piutang Wajib Pajak PBB-P2	Terlaksananya Penyelaksanaan Piutang Wajib Pajak PBB-P2	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- (1) Perlu Peningkatan Kualitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang;
- (2) Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan Prima yang diberikan Aparatur dalam Pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah.
- (3) Peningkatan dan Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis demi Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputersasi (sebagai contoh SISMIO, SIMAPATDA, Host To Host Bank serta Sistem lainnya yang berkaitan dengan Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah) dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak;

### **2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagai badan yang bertugas sebagai perencana peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) demi tata kelola pemerintahan yang baik. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2019 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel. T-C 31

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019  
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah  
Kota Batam**

Kode Rekening	Rancangan Awal Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program:</b>		<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>							
	<b>Kegiatan:</b> 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam		100%	2,606,579,676.00	2,751,445,020.00	Batam	1 Tahun Pelaksanaan Anggaran	100%	2,751,445,020.00	

			<b>Program</b>										
			<b>2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
			Kegiatan: 2)Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam		100%	1,699,319,926.00	3,283,662,164.29	Batam	1 Tahun Pelaksanaan Anggaran	100%	3,283,662,164.29	
			<b>Program</b>										
			<b>3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>										
			Kegiatan: 3.1)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota	Batam			1 Kali Pekan Panutan PBB Tingkat Kota	2,876,396,548.00	2,540,160,240.00	Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor PBB-P2	210.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	2,540,160,240.00

			Batam									
			Kegiatan: 3.2)Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Batam		2 Kali Silaturahmi	439,929,040.00	365,585,360.00	Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor BPHTB	1 Kali Silaturahmi	365,585,360.00
			Kegiatan: 3.3)Sosialisasi Pajak Daerah	Batam		3 Kali Sosialisasi	323,691,850.00	153,915,000.00	Batam	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	3 Kali Sosialisasi	153,915,000.00
			Kegiatan: 3.4)Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Batam		1 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Spanduk/Baliho dan Radio	1,064,499,000.00	796,530,000.00	Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	1 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Radio dan Cetak Spanduk/Baliho	796,530,000.00
			Kegiatan: 3.5)Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Batam		12500 Surat	836,481,131.00	901,750,560.00	Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	9080 Surat	901,750,560.00

				Kegiatan: 3.6)Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Batam		1600 Surat dan 260 Piagam	1,230,500,000.00	125,087,960.00	Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	125,087,960.00	
				Kegiatan: 3.7)Optimalisa si Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Batam		100%	200,000,000.00	99,100,000.00	Batam	Berkurangny a Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Tahun	99,100,000.00	

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan Walikota.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu aspek tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karenanya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

1. Belum sempurnanya regulasi (Peraturan Perundang-undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak, regulasi yang dimaksud termasuk pengembangan atau penyempurnaan mekanisme kerja dan SOP, struktur organisasi dan tata kerja dan seterusnya;
2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pengawasan maupun penindakan.
4. Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas, ini belum dapat meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.



7. Kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah.
8. Belum akuratnya data Piutang PBB-P2
9. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Kota Batam yang dinilai memberatkan Masyarakat Kota Batam dalam perizinan dan perpajakan.

Tabel. T.C 32

**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah  
Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5
		N I H I L		

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengarah pada Perumusan Kebijakan dan Koordinasi yang selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawa Cita, antara lain:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Batam Tahun 2016-2021, yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam, yaitu:

***“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika.

Untuk tahun 2016-2021 dirumuskan 6 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi;
2. Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera;
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dengan infrastruktur kota yang modern serta penataan pemukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah;
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di Daerah Kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode Tahun 2016-2021, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 6 (enam) Misi Kota Batam, adapun misi yang terkait dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Misi ke 1 yaitu : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan akuntabel dan mengayomi.***

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang, dengan demikian tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Batam yaitu Mewujudkan sumber pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel dan transparan.

### **Sasaran**

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil yang dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel Hubungan Antara Tujuandan Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</b>	1. Tercapainya target pendapatan pajak dan retribusi daerah	1. Jumlah pendapatan pajak daerah 2. Jumlah pendapatan retribusi daerah
	2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah	1. Persentase wajib pajak membayar pajak daerah
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pajak daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah 2. Nilai AKIP Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah oleh Inspektorat

Tabel. T-C.33  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan  
 Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun n Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan:</b> Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  <b>Bidang Urusan:</b> Pendapatan Asli Daerah  <b>Program:</b>  <b>1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	Kegiatan: 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	Batam	100%	2,606,579,676.00	APBD		100%	2,751,445,020.00
	<b>Program</b>								
	<b>2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								

			Kegiatan: 2)Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Batam	100%	1,6 99,319,926.00	APBD		100%	3,283,662,164.29
			<b>Program</b> 3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
			Kegiatan: 3.1)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	Terlaksananya Pekan Panutan PBB Tingkat Kota Batam dan Tingkat Kecamatan se Kota Batam	Batam	1 Kali Pekan Panutan PBB Tingkat Kota	2,876,396,548.00	APBD		210.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	2,540,160,240.00
			Kegiatan: 3.2)Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB dan Silaturahmi Dengan Pelaku Usaha	Batam	2 Kali Silaturahmi	439,929,040.00	APBD		1 Kali Silaturahmi	365,585,360.00
			Kegiatan: 3.3)Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak pajak daeah terhadap wajib pajak daerah	Batam	3 Kali Sosialisasi	323,691,850.00	APBD		3 Kali Sosialisasi	153,915,000.00
			Kegiatan: 3.4)Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Terlaksananya Infromasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Media Propaganda, Promosi dan Iklan serta Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Batam	1 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Spanduk /Baliho dan Radio	1,064,499,000.00	APBD		1 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Radio dan Cetak Spanduk/B aliho	796,530,000.00

			Kegiatan: 3.5)Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	Batam	12500 Surat	836,481,131.00	APBD		9080 Surat	901,750,560.00
			Kegiatan: 3.6)Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	Batam	1600 Surat dan 260 Piagam	1,230,500,000.00	APBD		1 Tahun	125,087,960.00
			Kegiatan: 3.7)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Terlaksananya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Batam	25%	200,000,000.00	APBD		1 Tahun	99,100,000.00



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019**

**4.1 Program**

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Batam selama 5 (lima) tahun, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2017 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam belum memadai untuk dapat meningkatkan PAD maka, BPPRD mengajukan untuk rencana kerja anggaran tahun 2019 dengan 3 (tiga) program, ini di prioritaskan untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan. Kami berharap semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi. Daerah Kota Batam masuk dalam Misi ke 1 dari RPJMD Kota Batam.

Untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam untuk tahun anggaran 2019 merencanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) jenis kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan.

**2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.

**3. Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah dengan kegiatan antara lain "Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor".

## **4.2 Kegiatan**

1. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari 9 kegiatan antara lain :
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah
  - Sosialisasi Pajak Daerah Kota Batam
  - Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating Penerimaan Daerah
  - Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan
  - Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak
  - Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
  
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
  
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
  - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

**TABEL RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM /KEGAIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>KEBUTUHAN PAGU DANA</b>	<b>SUMBER DANA</b>
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	1 Tahun	2,751,445,020.00	APBD
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	1 Tahun	3,283,662,164.29	APBD
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) di Wilayah Kota Batam	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor PBB-P2	100 %	2,540,160,240.00	APBD
4	Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor BPHTB	100 %	365,585,360.00	APBD
5	Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	100 %	153,915,000.00	APBD
6	Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	100 %	796,530,000.00	APBD

7	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	100 %	901,750,560.00	APBD
8	Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	100 %	1,125,087,960.00	APBD
9	Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan BANGunan Perdesaan dan Perkotaan	100 %	99,100,000.00	APBD
<b>TOTAL</b>				<b>12,017,236,304.29</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam disusun sebagai dasar dokumen perencanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam tahun 2016 – 2021 dimana berfungsi sebagai penjabaran rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan dibutuhkan dedikasi dan kerja keras oleh Sumber daya manusia dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, sehingga memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang sumber pendanaan pembangunan Kota Batam sebagai salah satu daerah otonomi.

Pendapatan Daerah merupakan kata kunci dari pembangunan daerah, semakin besar realisasi pendapatan daerah maka pelaksanaan pembangunan pun akan semakin pesat, selaras dengan pembangunan yang pesat kebutuhan masyarakat akan terlayani secara optimal.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2019 yang telah kami susun, semoga dapat diimplementasikan dan membawa perubahan yang signifikan terhadap kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam guna memenuhi tuntutan dan pelayanan kepada masyarakat.

Batam, 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk.I

NIP 19701120 200003 1 009